

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS SYARIAH
DALAM HAL TERJADINYA PENURUNAN HARGA EMAS PADA SAAT
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebgaian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

KINNANTI ALRIAN RELLAUTRI

NIM. 115010101111052



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS SYARIAH DALAM HAL TERJADINYA PENURUNAN HARGA EMAS PADA SAAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN

Kinnnati Alrian Rellautri, Warkum Sumitro, Siti Hamidah.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : 115010101111052@students.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah penurunan harga emas ketika nasabah tidak dapat menebus emas untuk membayar hutang pada Bank pada saat jatuh tempo sehingga objek jaminan berupa emas di eksekusi oleh pihak Bank. Eksekusi dilakukan dengan menjual atau melelang objek jaminan milik nasabah berupa emas tersebut sehingga merugikan pihak nasabah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana undang-undang sebagai sentral perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan gadai emas syariah apabila terjadi penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan yang dapat merugikan pihak nasabah.

Kata kunci : perlindungan hukum, gadai emas syariah, penurunan harga emas

Abstract

The study is done because of the risk in doing gold pawn financing conducted by syariah banks. There is a risk that may be the price of gold could not pay for the customers to pay off bank debt on gold at the time due to the gold in the form of guarantees by the bank. Execution done by selling auction object or belonging to the gold in the form of insurance customers so disrupting customers. The purpose of this research to find out, described and analyzes relating to legal protection to customer syariah gold pawn in terms of a decline in the price of gold objects at the time of the execution insurance. The kind of research done is normative juridical where the act as the youths central legislation. This study used the legislations. Material primary law, secondary and tertiary obtained writer will be analyzed using interpretation grammatical technique and interpretation systematic. The urgency of this research is to provide legal protection to customer in the conduct of syariah gold pawn if a decline in the price of gold at the time of the execution of the object of collateral that can harm customers

Keyword : The protection of the law, gold pawn syariah, the drop in the price of gold

PENDAHULUAN

Dewasa ini keberadaan lembaga pegadaian makin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Gadai adalah suatu bentuk perjanjian utang piutang dimana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu.¹

Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan. Gadai sering dilakukan oleh masyarakat ketika membutuhkan dana dalam waktu yang cukup singkat karena proses pencairan dana di pegadaian lebih cepat. Dalam hal ini bank syariah juga memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan pegadaian yaitu berupa layanan gadai syariah atau disebut juga dengan *Rahn*.

Rahn adalah perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Barang-barang yang dijadikan sebagai *rahn* adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau bertahan lama.²

Pada dasarnya jenis barang yang digadaikan harus sesuai dengan syariah. Barang-barang yang dapat di gadaikan antara lain: perhiasan, perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang lain yang dianggap bernilai. Namun diantara barang-barang tersebut yang paling diminati adalah gadai emas.

Gadai emas pada bank syariah tunduk terhadap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang perbankan syariah, tidak mengatur secara materiil mengenai praktik gadai emas syariah. Undang-undang perbankan syariah hanya mengatur secara formil yaitu pada pasal 19 ayat 1 huruf 9 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama nasabah dalam memperoleh pinjaman uang dengan menggadaikan emas milik nasabah tersebut. Fungsi gadai tidak hanya membantu

¹ Muhammad Sholikul Hadi, **Pegadaian Syariah**, Edisi Pertama, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal 3.

² Hasan Sadily, **Ensklopedi Islam**, Jilid V , PT Ichtiar Van Hoove, Jakarta, 2000, hal. 1480.

perolehan dana yang mudah dan cepat, tetapi juga sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah.

Seiring berjalannya waktu, nasabah mulai memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi untuk memiliki emas dan memperoleh keuntungan karena adanya unsur spekulasi nilai emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Sistem gadai emas dirasa sangat menguntungkan apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak. Bagi masyarakat menggadaikan emas jauh lebih menguntungkan daripada harus menjual emas tersebut.

Untuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadai emas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam memberikan layanan gadai emas syariah, Bank syariah harus tunduk terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah membatasi besaran pemberian pembiayaan maksimal sebesar Rp.250.000.000,00 dengan masa perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Bank Indonesia tersebut, Bank syariah melakukan penyesuaian sistem dan prosedur yang sesuai dengan peraturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Penyesuaian sistem dan prosedur ini mengakibatkan bank syariah meminta kepada nasabah yang menggadaikan emasnya tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah diubah untuk menebus emas dengan melunasi seluruh hutangnya.

Permasalahan muncul saat nasabah tidak dapat menebus emasnya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan peraturan di Bank, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah. Apabila eksekusi objek jaminan tersebut terjadi pada saat harga emas turun, maka nasabah akan mengalami kerugian. Fluktuasi harga emas mengakibatkan risiko apabila mengalami penurunan secara tiba-tiba pada saat eksekusi objek jaminan milik nasabah oleh pihak Bank. Nasabah yang emasnya dijual pada saat harga emas sedang turun akan kehilangan potensi keuntungan dan kerugian dari biaya gadai yang sudah dibayarkan.

Urgensi dari adanya penelitian ini adalah banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah khususnya risiko turunnya harga emas pada saat eksekusi objek jaminan berupa emas milik nasabah yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi nasabah. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya nasabah gadai emas syariah mengenai perlindungan hukum dalam melakukan gadai emas sehingga mencegah terjadinya kerugian bagi pihak nasabah.

PERMASALAHAN

Eksesekusi objek jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah terhadap emas milik nasabah pada saat harga emas sedang turun, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah. Disamping mengalami kerugian akibat penjualan emas mereka yang nilainya menjadi lebih rendah, juga harus membayar biaya penitipan gadai dan biaya lain-lain kepada Bank Syariah. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi nasabah untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

Oleh karena itu dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian yaitu “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan?”

PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Produk Gadai Emas Syariah

Gadai syariah (*rahn*) merupakan suatu perjanjian penyerahan harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh si berhutang kepada si berpiutang. Gadai syariah dapat dilakukan di lembaga pegadaian syariah maupun di bank syariah. Dalam melakukan gadai syariah, terlebih dahulu dilakukan suatu *akad*. *Akad* atau disebut juga sebagai suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Pada pegadaian syariah, terdapat beberapa produk dan jasa gadai syariah yang ditawarkan kepada masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut:³

³ Zainuddin Ali, **Hukum Gadai Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 67.

1. Pemberian pinjaman (*Qardh*)

Pemberian pinjaman (*qardh*) dilakukan berdasarkan hukum gadai syariah. Dalam pemberian pinjaman, kreditur harus menyerahkan suatu barang sebagai jaminan utangnya kepada debitur dimana barang yang dijaminkan merupakan barang bergerak. Pemberian pinjaman ini sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas barang yang dijadikan jaminan.

2. Penaksiran nilai barang

Penaksiran nilai barang merupakan jasa layanan pegadaian syariah kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai barang yang dimiliki seperti emas, berlian, permata dan lain-lain. Biaya yang dikenakan adalah berupa biaya penaksiran barang.

3. Penitipan barang berupa sewa (*Ijharah*)

Penitipan barang berupa sewa memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga. Biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ingin berpergian jauh dalam waktu yang lama. Biaya yang dikenakan pada produk ini adalah biaya sewa penitipan barang.

4. *Gold Counter*

Gold Counter merupakan tempat penjualan emas yang berkualitas dan aman yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Pembelian emas di *gold counter* biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas dimana apabila melakukan pembelian maka akan mendapatkan suatu sertifikat jaminan. Berdasarkan sertifikat tersebut masyarakat akan percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas yang dibeli.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai produk gadai syariah berupa gadai emas syariah. Dimana dalam melakukan gadai emas syariah, barang yang dijadikan jaminan gadai berupa emas. Dalam gadai emas syariah ini jasa yang ditawarkan adalah berupa pemberian pinjaman (*qardh*) dan penitipan barang berupa sewa (*ijharah*).

Dalam melakukan gadai emas, bank syariah maupun unit usaha syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang *qardh*

beragun emas yang selanjutnya disebut SEBI No 14/7/DPbS. Dalam ketentuan umum SEBI No 14/7/DPbS butir 3 dijelaskan:⁴

“*Qardh* beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijharah*”.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melakukan perjanjian gadai emas syariah, terdapat 3 akad yang digunakan, antara lain adalah:

- a. Akad *qardh*, untuk pengikatan pemberian pinjaman dana yang diberikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- b. Akad *rahn*, untuk pengikatan barang jaminan berupa emas sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diberikan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- c. Akad *ijharah*, untuk pengikatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijadikan jaminan dalam pemberian pinjaman dana.

Biaya yang dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijaminakan dalam gadai emas syariah. Besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijaminakan ditentukan berdasarkan pada berat emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah.

Diberlakukannya SEBI No 14/7/DPbS juga membatasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah seperti yang dijelaskan pada Ketentuan III tentang prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk *qardh* beragun emas butir 4 yaitu:⁵

“Pembiayaan *qardh* beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah,

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali”

Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal dari gadai emas syariah yaitu alternatif pembiayaan berskala mikro yang pada awalnya dijadikan alat investasi oleh masyarakat.

Pada umumnya syarat dan prosedur setiap Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas adalah sama. Syarat yang digunakan setiap Bank Syariah dalam melakukan gadai emas syariah sesuai dengan syarat-syarat gadai syariah pada umumnya. Syarat-syarat melakukan gadai syariah adalah sebagai berikut:⁶

a. *Rahin dan Murtahin*

Rahin dan *murtahin* merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai syariah (*rahn*). Pihak-pihak tersebut harus cakap hukum. Apabila ada seorang anak yang ingin melakukan perjanjian *rahn* maka harus atas persetujuan dari walinya. Dalam pembiayaan melalui gadai emas di Bank Syariah, *Rahin* adalah nasabah dan *Murtahin* adalah Bank Syariah yang memberikan pembiayaan.

b. *Marhun*

Marhun adalah benda yang dijaminkan dalam melakukan gadai syariah (*rahn*). Secara umum barang gadai harus memenuhi syarat antara lain:

1. Barang dapat diperjualbelikan
2. Harus berupa barang yang memiliki nilai
3. Dapat dimanfaatkan secara syariah
4. Dapat diketahui keadaan fisik dari barang tersebut
5. Harus dimiliki oleh *rahin*
6. Barang tidak terikat dengan hak orang lain

Dalam gadai emas di bank syariah, *marhun* yang digunakan adalah emas. Emas dianggap telah memenuhi semua syarat dari barang gadai tersebut diatas.

⁶ Adrian Sutedi, **Hukum Gadai Syariah**, Alfabeta, Bandung, 2011, halaman 37.

c. *Marhun Bih*

Marhun bih adalah utang yang menjadi dasar perjanjian rahn tersebut. Dalam hal ini untuk adanya *marhun bih* harus memenuhi beberapa syarat sah nya gadai syariah (*rahn*), yaitu:

1. Merupakan hak wajib yang diberikan kepada *murtahin*
2. *Marhun bih* dapat dilunasi dengan marhun dalam perjanjian *rahn* tersebut
3. *Marhun bih* tersebut jelas dan tetap
4. Memungkinkan adanya pemanfaatan
5. Dapat diukur dan dihitung jumlahnya

Marhun bih dalam gadai emas syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. Seperti yang telah disebutkan diatas, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Gadai emas syariah merupakan produk yang mengandung beberapa risiko seperti risiko penurunan harga. Penurunan harga emas yang tidak dapat dikira-kira sebelumnya, seringkali menyebabkan kerugian pada nasabah gadai emas. Persyaratan, prosedur serta peraturan gadai emas yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah sejauh ini belum mengatur mengenai apabila terjadi penurunan harga emas pada saat objek jaminan berupa emas milik nasabah dieksekusi oleh pihak Bank.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah

Di Indonesia memang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan permasalahan perlindungan terhadap nasabah gadai emas dalam hal penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Namun terkait dengan perlindungan nasabah dalam hubungannya dengan Bank Syariah, telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan.

Salah satu dasar hukum utama dari setiap kegiatan usaha perbankan, baik konvensional maupun syariah, adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan usaha perbankan yang dibahas dalam penelitian ini adalah gadai emas di Bank Syariah dimana dalam gadai emas mengandung risiko yang dapat merugikan nasabah. Kerugian disini salah satunya disebabkan oleh fluktuasi harga emas yang mengakibatkan penurunan harga pada emas. Penurunan harga emas berakibat nasabah akan mengalami kerugian apabila terjadi

eksekusi objek jaminan berupa emas tersebut. Dalam UU Perbankan tersebut dijelaskan mengenai ketentuan yang dapat memberikan perlindungan nasabah sehubungan dengan mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah tersebut yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 4 yang berbunyi:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah tersebut sangat penting mengingat nasabah perlu mengetahui dengan baik dan jelas perihal kegiatan usaha Bank dan menjamin adanya transparansi dalam kegiatan usaha tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai risiko yang terkandung dalam gadai emas, nasabah perlu mengetahui risiko tersebut sebelum menggadaikan emasnya. Karena apabila nasabah tidak mengetahui informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko dalam transaksi gadai emas tersebut, nasabah kemungkinan juga akan mengalami kerugian yang cukup besar diakibatkan oleh timbulnya risiko tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap nasabah di Bank Syariah. Dijelaskan pada Pasal 2 dalam undang-undang tersebut bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut diharapkan tidak memberatkan atau bahkan merugikan para nasabah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Adapun pengertian dari ketiga hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 38 tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah”.

Kemudian terkait dengan kemungkinan timbulnya risiko yang akan dihadapi nasabah dalam penggunaan produk Bank Syariah, telah diatur bahwa Bank Syariah wajib menjelaskan sebelumnya kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian tersebut.

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di bank syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan berkaitan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, mencegah bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable* dan meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*. Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 38 ayat 1 UU no 21 tahun 2008, manajemen risiko merupakan rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bagi nasabah itu sendiri, manajemen risiko bermanfaat untuk dapat memberikan bagi hasil atau keuntungan yang lebih baik dan meningkatkan jaminan keamanan dalam menggunakan jasa perbankan.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan

Dalam melakukan gadai emas di bank syariah, hal yang perlu diketahui adalah mengenai fluktuasi harga emas yang kendati sering berubah-ubah setiap tahunnya. Hal tersebut sangat penting terkait dengan untung-rugi yang akan diperoleh oleh nasabah dalam melakukan gadai emas di bank syariah.

Apabila terjadi penurunan harga emas pada saat objek jaminan berupa emas milik nasabah dieksekusi oleh pihak Bank, maka kerugian besar akan dialami oleh nasabah. Nasabah bank syariah mendapat kerugian akibat penjualan objek jaminan oleh pihak Bank pada saat harga emas sedang turun serta wajib membayar biaya gadai emas dan biaya sewa tempat untuk penitipan emasnya di bank syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah di bank syariah dalam hal penurunan harga emas pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian

terhadap nasabah gadai emas di Bank Syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada nasabah terkait dengan gadai emas syariah pada saat penurunan harga emas. Namun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai emas syariah dan risiko penurunan harga emas yang akan dijabarkan berikut ini.

(1) Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penurunan harga emas dalam manajemen risiko termasuk kedalam kategori manajemen risiko pasar. PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Disebut risiko pasar karena risiko ini berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam cakupan pasar. Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Penurunan harga emas dalam penelitian ini termasuk ke dalam risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.⁷ Risiko nilai tukar tersebut merupakan suatu konsekuensi yang terkait dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar. Dalam perbankan syariah sendiri sebenarnya mensyaratkan tidak diperbolehkannya transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Dalam hal ini bank syariah perlu menetapkan *exposure limit*, *transaction limit*, *currency limit*, *turnover limit*, *cut loss limit*, *intraday limit* dan *counterparty limit*.⁸

Dalam pasal 2 ayat 1 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Kemudian dijelaskan pada pasal 3 mengenai penerapan manajemen risiko itu sendiri paling sedikit mencakup:⁹

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;

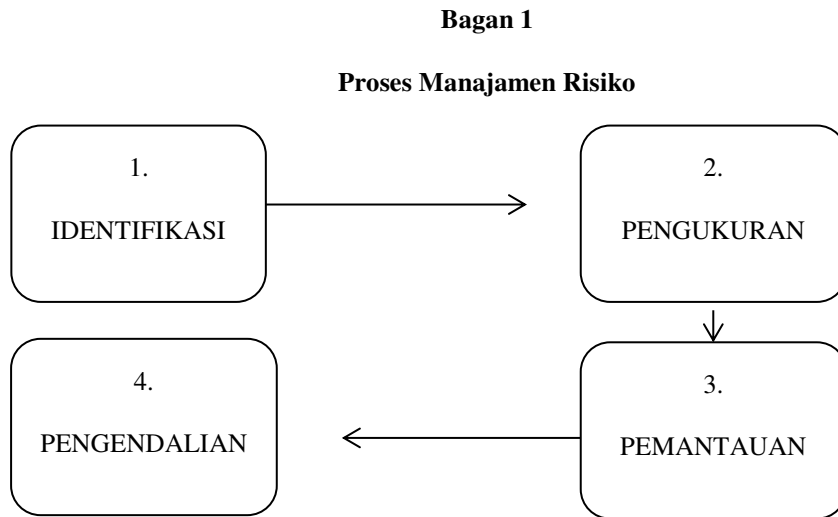
⁷ Rachmadi Usman, **Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 293.

⁸ Bambang Rianto Rustam, **Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, halaman 137.

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dapat disimpulkan dari penjelasan pasal diatas bahwa proses dari manajemen risiko sendiri adalah seperti yang digambarkan pada bagan berikut ini:



Sumber: *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, diolah, 2014.*

Dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 dijelaskan bahwa Bank wajib melakukan proses manajemen risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material.

(1) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah atau disebut juga dengan SEBI 14/7/DPbS sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan risiko bagi Bank Syariah sendiri mengingat pada saat ini masyarakat tidak lagi menggadaikan emasnya hanya untuk mendapatkan kredit melainkan sebagai alat investasi. Dalam SEBI 14/7/DPbS tersebut Bank Indonesia memberikan batasan-batasan terkait untuk pembiayaan melalui transaksi kredit beragun emas atau gadai emas. Namun dalam SEBI 14/7/DPbS terdapat pasal-pasal yang memberi perlindungan terhadap nasabah agar nasabah berhati-hati dalam melakukan gadai emas sehingga tidak akan mengalami kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Dalam ketentuan karakteristik produk *qardh* beragun emas butir ke 7 yang terdapat pada SEBI 14/7/DPbS dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan melalui *qardh* beragun emas, Bank Syariah wajib melaksanakannya dengan didukung kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko inilah yang penting dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi Bank maupun nasabahnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen risiko yang berkaitan dalam penelitian ini adalah risiko pasar. Risiko pasar sendiri sangat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus berhati-hati dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, fluktuasi harga emas yang dapat merugikan nasabah adalah penurunan harga emas pada saat objek jaminan dieksekusi oleh pihak Bank. Untuk itu dalam SEBI 14/7/DPbS juga mewajibkan Bank Syariah menjelaskan secara lisan atau tertulis kepada nasabah mengenai karakteristik produk yang meliputi fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, penyelesaian apabila terdapat sengketa, serta hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Dalam melaksanakan gadai emas di Bank Syariah juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara satu pihak dan pihak lain seringkali terjadi sengketa. Sengketa dapat terjadi apabila terdapat kerugian pada salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lainnya. Kerugian dapat disebabkan apabila salah satu pihak melanggar aturan dalam perjanjian atau tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah dan Bank Syariah, sengketa terjadi apabila perselisihan antara nasabah dan Bank tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern dan membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan umum maupun di luar pengadilan umum seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

(1) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Umum

Mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dan Bank Syariah, telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Melalui penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang belum menghapus kewenangan pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama yang meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

Dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, yang menjadi subyek di depan pengadilan dan dapat bertindak sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat adalah bank syariah dan nasabah. Bank syariah menjadi salah satu subyek yang dapat berperkara di Pengadilan Agama karena merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasannya. Untuk nasabah sendiri menjadi subyek dari Pengadilan Agama karena sebagai orang yang beragama Islam atau orang yang tunduk pada hukum Islam. Adapun yang menjadi obyek dalam sengketa adalah berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni antara bank syariah dan nasabah, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, serta perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada hukum Islam.

Dari kedua penjelasan Undang-Undang diatas (UU Nomor 21 tahun 2008 dan UU Nomor 3 tahun 2006), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dualisme lembaga peradilan dalam memberikan upaya perlindungan represif terhadap nasabah, yaitu antara pengadilan umum dan pengadilan agama. Namun kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan nasabah, khususnya nasabah dalam gadai emas di Bank Syariah yang dibahas dalam penelitian ini.

(2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Umum

Dalam penyelesaian sengketa, nasabah diberikan pilihan untuk menyelesaikan di pengadilan umum atau di luar pengadilan umum. Dalam hal pihak nasabah yang bersengketa adalah nasabah kecil dan Usaha Mikro Kecil (UMK), pastilah akan lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum.

Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Bank Syariah, telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan umum sesuai dengan isi akad. Sesuai dengan isi akad disini salah satunya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

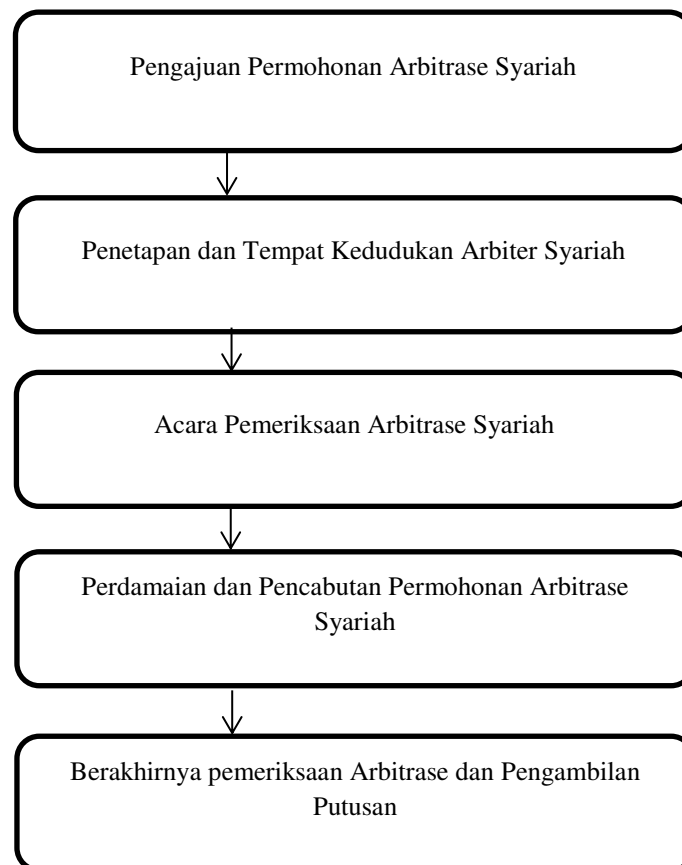
Basyarnas sebelumnya bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Kemudian atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan lembaga otonom dan

independen sebagai salah satu instrumen hukum dalam menyelesaikan sengketa di bidang syariah.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa, Basyarnas memiliki prosedur penyelesaian sengketa tersendiri namun tetap berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti dijelaskan pada bagan dibawah ini:

Bagan 2

Prosedur Penyelesaian Sengketa



Sumber: *Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diolah, 2014.*

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah gadai emas dengan pihak Bank Syariah dalam hal eksekusi objek jaminan pada saat terjadinya penurunan harga emas dapat melalui pengadilan umum maupun di luar

pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dilakukan melalui Basyarnas. Menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas dirasa lebih menguntungkan bagi nasabah khususnya nasabah golongan menengah ke bawah dan nasabah usaha mikro kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan dapat dibagi menjadi dua perlindungan, yaitu perlindungan hukum secara umum oleh undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dengan Bank dan perlindungan hukum secara khusus terkait dengan perlindungan nasabah gadai emas syariah dalam hal penurunan harga emas.

Perlindungan hukum secara umum yang diberikan oleh undang-undang terhadap nasabah dalam melakukan transaksi dengan Bank adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bentuk pengaturan mengenai kewajiban Bank dalam menyediakan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi yang dilakukan nasabah;

Perlindungan hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas adalah perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Mengengai penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dapat dilakukan oleh lembaga arbitrase antara lain adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Saran

Bagi Pihak Nasabah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan produk Bank. Sebelum menggunakan produk Bank atau melakukan transaksi dengan Bank, diharapkan untuk mencari informasi yang jelas mengenai produk tersebut dan mengetahui kemungkinan timbulnya risiko terkait dengan produk Bank tersebut agar Nasabah terhindar dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill-CO, Jakarta, 2005
- H. Mardjono, *Petunjuk Praktis; Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta, 2000
- Hasan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, PT Ichtiar Van Hoove, Jakarta, 2000
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty*, Yogyakarta, 1984
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955
- Huzaimah Y. Tanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer III, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 1995
- J. Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Vol.20*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002
- J. Satria, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebarangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2009
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2005
- Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Reinesa, Jakarta, 2007
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
Tim kerja, *Penelitian hukum tentang aspek hukum pertanggung jawaban bank\ terhadap nasabah, proyek kerjasama Bank Indonesia dengan BPHN Departemen Kehakiman-RI*, Jakarta, 1995

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran SK DIR BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999

Peraturan bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian pengaduan Nasabah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

